
PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Per Posisi Tanggal : 8 Januari 2018/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRI SEPTA
2. Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 400896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.611.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 17000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m2/100 m2 di Kota PADANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/- m2 di Kota PADANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000		
8. Tanah dan Bangunan Seluas 15200 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 76.000.000		
9. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/- m2 di Kota PASAMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	710.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR (4X4) 8 A/T Tahun 2016, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 560.000.000		
2. MOBIL, NISSAN JUKE 1.5 (4X2) AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.835.762
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.337.335.762

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal 7 Maret 2018.